

**PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG**

**(099511)**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021**



Jl. Jend. Sudirman No. 169

Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan 91611

Telp. (0421) 90336 Fax. (0421) 90696

e-mail : [pnsidrap099512@gmail.com](mailto:pnsidrap099512@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Jend. Sudirman No. 169**

**Telp. 0421-90336 Fax. 0421-90696**

**Sidenreng Rappang - Sulawesi Selatan 91611**

**e-mail : [pnsidrap@yahoo.co.id](mailto:pnsidrap@yahoo.co.id)**

**[www.pnsidrap.co.id](http://www.pnsidrap.co.id)**

Lampiran IVA  
Peraturan Menteri Keuangan  
Nomor:  
tentang Pedoman Penyusunan Laporan  
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

**ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT  
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.


Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas /pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Sidrap, 7 Februari 2022  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
KAMIL, SE  
NIP. 19770224 200912 1 002

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Tanggung Jawab</b>	<b>iii</b>
<b>Ringkasan Laporan Keuangan</b>	<b>1</b>
<b>I. Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>4</b>
<b>II. Neraca</b>	<b>5</b>
<b>III. Laporan Operasional</b>	<b>6</b>
<b>IV. Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>7</b>
<b>V. Catatan atas Laporan Keuangan</b>	<b>8</b>
<b>A. Penjelasan Umum</b>	<b>8</b>
<b>B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran</b>	<b>18</b>
<b>C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca</b>	<b>22</b>
<b>D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional</b>	<b>32</b>
<b>E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas</b>	<b>37</b>
<b>F. Pengungkapan Penting Lainnya</b>	<b>39</b>
<b>VI. Lampiran dan Daftar</b>	
- Kertas Kerja Telaah	



## PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG KELAS II

Jl Jenderal Sudirman Nomor 169, Telpon : (0421) 90336-90696,

Faximile : (0421) 90696, Email : [pnsidrap099512@gmail.com](mailto:pnsidrap099512@gmail.com)

Website : [www.pn-sidrap.go.id](http://www.pn-sidrap.go.id)

Sidenreng Rappang, 91611

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidrap yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sidrap, 7 Februari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran

K A M I L, SE

NIP. 19770224 200912 1 002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sidrap per 31 Desember Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 5.100.364,- dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 4.703.000, sedangkan Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.368.696,-

Realisasi Belanja Negara pada per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.083.224.818,- atau mencapai 99.51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.108.307.000,- sedangkan realisasi belanja Negara per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.545.639.240,- atau mencapai 98.71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.605.126.000,-

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada per 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 20.994.089.863,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 3.704.000,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 20.990.384.963,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 26.896.892,- dan Rp. 20.967.192.971,-

Sedangkan nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat sebesar Rp. 21.678.387.707,- yang terdiri dari Aset lancar sebesar Rp. 345.000,- Aset tetap (neto) sebesar Rp. 21.678.042.707,- dan aset lainnya (netto) sebesar Rp. 0,- dan nilai kewajiban

dan ekuitas masing-masing sebesar Rp. 24.040.608,- dan Rp. 21.655.046.239,-

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 4.730.364 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.797.258.946 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.792.528.582). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 370.000,- dan defisit sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (5.792.158.582).

Untuk periode per 31 Desember 2020 Pendapatan LO adalah sebesar Rp. 4.368.696,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 5.496.571.311,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.492.202.615). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 378.250 dan defisit sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (5.491.824.365).

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 21.654.347.099 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (5.792.158.582) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset tahun berjalan sebesar Rp. 0 dan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.105.004.454,- dan kenaikan /penurunan ekuitas sebesar Rp. (687.154.128),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 20.967.192.971,-

Dan dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 22.924.650.298 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (5.491.824.365) kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset tahun berjalan sebesar Rp. 0,- dan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.541.270.544,- dan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. (1.270.303.199) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 21.654.347.099,-



## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENGADILAN NEGERI SIDRAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.703.000	5.100.364	85,65	4.368.696
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.703.000</b>	<b>5.100.364</b>	<b>85,65</b>	<b>4.368.696</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	5.108.307.000	5.083.224.818	64,78	3.292.687.042
Belanja Barang	B.4	3.528.189.000	3.516.855.382	34,92	1.227.952.198
Belanja Bantuan Sosial	B.5				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>8.636.496.000</b>	<b>8.600.080.200</b>	<b>52,57</b>	<b>4.520.639.240</b>
<b>Belanja Modal</b>					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	1.342.618.000	1.329.147.936	5316,59	25.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.10	-	-	0,00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>1.342.618.000</b>	<b>1.329.147.936</b>	<b>5316,59</b>	<b>25.000.000</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>9.979.114.000</b>	<b>9.929.228.136</b>	<b>45,78</b>	<b>4.545.639.240</b>

**PENGADILAN NEGERI SIDRAP**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 21	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNPB	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	3.704.900	345.000
Jumlah Aset Lancar		3.704.900	345.000
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.13	10.273.900.000	10.273.900.000
Peralatan dan Mesin	C.14	2.499.072.349	2.163.763.099
Gedung dan Bangunan	C.15	13.611.690.300	13.611.690.300
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	63.604.769	63.414.769
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(5.457.882.455)	(4.434.725.461)
Jumlah Aset Tetap		20.990.384.963	21.678.042.707
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.20	24.349.000	24.349.000
Aset Lain-Lain	C.21	321.068.410	394.356.160
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(345.417.410)	(418.705.160)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>20.994.089.863</b>	<b>21.678.387.707</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	26.896.892	24.040.608
Pendapatan Diterima di Muka	C.25	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		26.896.892	24.040.608
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>26.896.892</b>	<b>24.040.608</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.26	20.967.192.971	21.655.046.239
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>20.967.192.971</b>	<b>21.655.046.239</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>20.994.089.863</b>	<b>21.679.086.847</b>

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PENGADILAN NEGERI SIDRAP LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	4.730.364	4.368.696
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>4.730.364</b>	<b>4.368.696</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	3.518.646.532	3.293.560.042
Beban Persediaan	D.3	38.273.100	39.692.150
Beban Barang dan Jasa	D.4	860.900.857	793.420.095
Beban Pemeliharaan	D.5	378.069.219	357.864.608
Beban Perjalanan Dinas	D.6	51.499.994	35.365.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	949.869.244	976.669.416
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>5.797.258.946</b>	<b>5.496.571.311</b>
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		<b>(5.792.528.582)</b>	<b>(5.492.202.615)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		370.000	378.250
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		<b>(5.792.158.582)</b>	<b>(5.491.824.365)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(5.792.158.582)</b>	<b>(5.491.824.365)</b>

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### PENGADILAN NEGERI SIDRAP LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	21.654.347.099	22.925.349.438
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5.792.158.582)	(5.491.824.365)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	-	69.511.622
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	-	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
KOREKSI REVALUASI ASET TETAP	E.7	(687.154.128)	(389.261.000)
Jumlah Lain-Lain		-	69.511.622
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	5.105.004.454	4.541.270.544
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>20.280.038.843</b>	<b>22.044.307.239</b>

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sidrap.

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

#### VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG

##### VISI

Visi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah  
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang  
yang Agung"

##### MISI

Misi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

##### MOTTO :

*PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG  
"S I G A P"*

*Santun, Ikhlas, Giat, Akuntabel, Profesional*

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang melakukan beberapa langkah-langkah startegis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sidrap. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3. Basis Akuntansi**

Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Penagadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum



Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (\*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

#### **Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

#### **Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Aset Lainnya*

#### **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

## *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0n%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	0%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	0%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

## (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis Akrual  
Pertama kali*

#### **(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi  
Pendapatan  
Rp.5.100.364

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 5.100.364,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0 Pendapatan Pengadilan Negeri Sidrap terdiri dari Pendapatan penerimaan Negara Bukan Pajak pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember TA 2021

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	5.100.364	0
Total Pendapatan		0	5.100.364	0

Realisasi Pendapatan jasa per 31 Desember 2021 mengalami perubahan dibandingkan TA 2020, Hal ini disebabkan oleh Pengadilan Negeri Sidrap mempunyai beban pendapatan yang berasal dari jasa atau Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji, adapun pendapatan lain-lain, adalah pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang berjalan.

#### Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	Tahun 2020	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	0
Total Pendapatan		-	-	-	0

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp.4.545.639.240

### B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 4.545.639.240,- atau 98.71 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 4.605.126.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021*

URAIAN	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.528.189.000	3.292.687.042	99,68
Belanja Barang	1.342.618.000	1.227.952.198	99,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Belanja Modal	237.500.000	25.000.000	99,88
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>5.108.307.000</b>	<b>4.545.639.240</b>	<b>99,51</b>
Pengembalian Belanja	0	0	
<b>Jumlah</b>	<b>5.108.307.000</b>	<b>4.545.639.240</b>	<b>99,51</b>

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja 31 Desember 2021 mengalami Kenaikan sebesar (11.83) % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

- Pengadaan Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan adanya mutasi pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun yang lalu
- Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2021

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.516.855.382	3.292.687.042	6,81
Belanja Barang	1.329.147.936	1.227.952.198	8,24
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	237.221.500	25.000.000	848,89
<b>Jumlah</b>	<b>5.083.224.818</b>	<b>4.545.639.240</b>	<b>11,83</b>

Belanja Pegawai  
Rp.3.156.855.382

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.156.855.382 dan Rp. 3.292.687.042 Realisasi belanja 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 6.81 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya mutasi pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun yang lalu.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2020	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.516.855.382	3.292.687.042	6,81
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	-
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.516.855.382</b>	<b>3.292.687.042</b>	<b>6,81</b>

Belanja Barang  
Rp.1.329.147.936

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.329.147.936,- dan Rp. 1.227.952.198,- Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 8.57 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja barang operasional yang cukup signifikan.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0

### B.5 Belanja Bantuan Sosial

Pada Kantor Pengadilan Negeri Sidrap tidak terdapat belanja bantuan sosial.

Belanja Modal Tanah Rp.0

### B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin  
Rp.237.221.500,-

### B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 237.221.500,- mengalami Kenaikan sebesar (84.89) % bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- Hal ini disebabkan adanya belanja peralatan dan mesin berupa alat sidang online yang cukup signifikan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	237.221.500	25.000.000	848,89
	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>237.221.500</b>	<b>25.000.000</b>	<b>848,89</b>

Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan Rp.0

### B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0

Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan Rp.0

### B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2021 dan TA. 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0

Belanja Modal  
Lainnya Rp. 0

### B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 dan TA. 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp. 0

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	31 Des 21	TH 2020
BPG 057 PENGADILAN NEGERI SIDRAP QQ 01	-	-
653240995111000	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp.0

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Biaya Perkara per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	31 Des 21	TH 2020
Nihil	0	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp 0.

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	31 Des 21	TH 2021
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	0
Pajak PPh yang belum disetor	-	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Piutang Bukan Pajak  
Rp 0.

#### C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Uraian	31 Des 21	TH 2020
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0

#### C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*

No	Nama	31 Des 21	Tahun 2020
1	Jacobus	-	-
2	Martiana	-	-
3	Karel	-	-
4	Darma	-	-
5	Julianda	-	-
6	Okta	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar TPA  
Rp.0

### C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	31 Des 21	Tahun 2020
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
<b>Jumlah</b>		-	-

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Pendek  
Rp.0

### C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Belanja Dibayar di Muka  
Rp.0

### C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka*

Jenis	31 Des 21	TH 2020
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Persediaan  
Rp.3.704.900

### C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.704.900,- dan Rp. 345.000,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan*

Persediaan	31 Des 20	TH 2019
Barang Konsumsi	2.855.900	120.000
Barang untuk Pemeliharaan	849.000	225.000
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.704.900</b>	<b>345.000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR  
Rp.0

### C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

TPA  
Rp.0

### C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp.0

## C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0.00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

Tanah  
Rp.10.273.900.000,-

## C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Sidrap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 10.273.900.000 dan Rp. 10.273.900.000 dan tidak mengalami perubahan / Mutasi nilai tanah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	<b>10.273.900.000</b>
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>10.273.900.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



*Rincian Tanah*

No	Luas	Atas Nama	Nilai
1	3,429 M2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6.260.668.000
2	348 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	535.990.000
3	205 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	312.605.000
4	218 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	289.995.000
5	222 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	338.528.000
6	309 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	411.047.000
7	312 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	505.736.000
8	319 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	424.350.000
9	378 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	502.835.000
10	427 M2	Tanah Bangunan Rumah Dinas Pemerintah	692.146.000
<b>Jumlah</b>			<b>10.273.900.000</b>

*Peralatan dan Mesin*  
Rp.2.499.072.349,-

#### **C.14 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 2.499.072.349,- dan Rp. 2.163.763.099,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>2.163.763.099</b>
Mutasi tambah:	335.309.250
<b>Pembelian</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>2.499.072.349</b>

Akumulasi Penyusutan saldo buku:

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp. 0,-

*Gedung dan Bangunan*  
Rp. 13.611.690.300

#### **C.15 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.13.611.690.300 dan Rp.13.611.690.300 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>13.611.690.300</b>
Mutasi tambah:	0
<b>Pembelian</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	0
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>13.611.690.300</b>

Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan.

Jalan, Jaringan dan  
Irigasi Rp.0

### C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 . Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021</b>	-
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp. 63.604.769

### C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 63.604.769 dan Rp. 63.414.769 Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk 31 Desember 2021.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>63.414.769</b>
Mutasi tambah:	190.000
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>63.604.769</b>

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya mengalami perubahan senilai Rp. 190.000

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp 0

### C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp(5.457.882.455)

### C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp. (5.457.882.455) dan Rp. (4.434.725.461).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.499.072.349	1.872.037.531	627.034.818
2	Gedung dan Bangunan	13.611.690.300	2.537.987.930	11.073.702.370
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	63.604.769	24.700.000	38.904.769
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>16.174.367.418</b>	<b>4.434.725.461</b>	<b>11.739.641.957</b>

*Aset Tak Berwujud  
Rp. 24.349.000*

### C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 24.349.000,- dan Rp. 24.349.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Akuntansi Istimewa Papua berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Jan 2020</b>	<b>24.349.000</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>24.349.000</b>
Pembelian	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2021</b>	<b>24.394.000</b>

*Aset Lain-Lain  
Rp.321.068.410*

### C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 321.068.410 dan Rp 394.356.160 Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
Rp.(345.417.410)

### C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. (345.417.410) dan Rp. (418.705.160). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	24.349.000	24.349.000	0
Aset Lain-lain	394.356.160		394.356.160
<b>Jumlah</b>	<b>418.705.160</b>	<b>24.349.000</b>	<b>394.356.160</b>

Uang Muka dari KPPN  
Rp. 0

### C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak Ketiga  
Rp .26.896.892

### C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 26.896.892 dan Rp. 24.040.608 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Negeri Sidrap pertanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

NO	D/K	URAIAN NAMA AKUN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	522111	Pemakaian listrik bulan Desember 2021	8.741.877	
	212112			-
2	522112	Pemakaian telpon bulan Desember 2021	77.490	
	212112			-
3	522113	Pemakaian Air bulan Desember 2021	50.375	
	212112			-
4	511119	Biaya Uang Makan PNS bulan Desember 2021	18.027.150	
	212112			
Jumlah			26.896.892	

*Pendapatan Diterima di Muka  
Rp.0*

### **C.25 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga.

*Ekuitas  
Rp. 20.967.192.971,-*

### **C.26 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.967.192.971,- dan Rp. 21.655.046.239,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB  
Rp.4.730.364,-

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 4.730.364,- dan Rp. 4.368.696,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020*

URAIAN	31 Desember 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	4.730.364	4.368.696	92,35
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.730.364</b>	<b>4.368.696</b>	<b>92,35</b>

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2021.

Beban Pegawai  
Rp.3.518.646.532,-

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.293.560.042,- dan Rp. 3.293.560.042,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 21	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.214.187.260	1.141.656.300	94
Beban Tunjangan-Tunjangan	2.302.853.316	1.793.873.526	78
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(2.682)	(446)	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.517.043.258</b>	<b>2.935.529.380</b>	<b>83</b>

Beban Persediaan  
Rp.38.273.100,-

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 38.273.100,- dan Rp. 39.692.150,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021

dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	30 Jun 21	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	38.273.100	39.692.150	96,42
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>38.273.100</b>	<b>39.692.150</b>	<b>96,42</b>

*Beban Jasa  
Rp.860.900.857,-*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 860.900.857 dan Rp. 793.420.095. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	101.401.720	115.310.051	113,72
Beban Jasa Pos dan Giro	11.399.500	20.399.900	55,88
Beban Keperluan Perkantoran	580.853.092	559.604.544	103,80
Beban Jasa Profesi	45.000.000	45.000.000	100,00
Beban Jasa Lainnya	73.620.545	53.105.600	72,13
<b>Jumlah</b>	<b>812.274.857</b>	<b>793.420.095</b>	<b>97,68</b>

*Beban Pemeliharaan  
Rp.378.069.219,-*

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 378.069.219,- dan Rp. 357.864.608,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai :

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 21	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	164.999.929	142.127.870	86,14
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	128.550.484	126.829.468	98,66
Beban Pemeliharaan Lainnya	76.551.856	79.196.370	103,45
<b>Jumlah</b>	<b>370.102.269</b>	<b>348.153.708</b>	<b>94,07</b>

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp.51.499.994,-

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 51.499.994 dan Rp. 35.365.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 21	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	51.499.994	35.365.000	145,62
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	-	-
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-1.080.000	-1.730.000	160,19
<b>Jumlah</b>	<b>50.419.994</b>	<b>33.635.000</b>	<b>149,90</b>

Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada Masyarakat  
Rp.0

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0.

Beban Bantuan  
Sosial Rp.0

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp.949.869.244,-

#### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 949.869.244,- dan Rp. 976.669.416,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:



Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Des 21	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	187.876.398	214.676.570	88
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	761.992.846	761.992.846	100
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>949.869.244</b>	<b>976.669.416</b>	<b>97</b>
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>949.869.244</b>	<b>976.669.416</b>	<b>97</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp.0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Lain-lain  
Rp.0

#### D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain 31 Desember Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	per 31 Des 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Surplus /Defisit dari  
Kegiatan Non  
Operasional Rp.0

## D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	per 30 Juni 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut Darat	0	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	0	-	-
Defisit Selisih Kurs	0	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pos Luar Biasa  
Rp.0

## D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2021 dan 2020*

URAIAN	per 31 Des 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal*  
*Rp.21.654.347.099*

### E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.654.347.099,- dan Rp. 22.924.650.298,-

*Defisit LO*  
*Rp(5.792.158.582)*

### E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. (5.792.158.582) dan Tahun 2021 adalah sebesar Rp (5.491.824.365) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan Rp.0*

### E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Aset Tetap*  
*Rp. 0*

### E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

*Koreksi Atas Beban*  
*Rp.0*

### E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-

masing sebesar Rp.0 dan Rp 0. Rincian untuk per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Beban*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	-
Beban Jasa	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Pendapatan Rp.0*

**E.6 Koreksi Atas Pendapatan**

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Pendapatan*

Jenis Pendapatan	Koreksi
Pendapatan Jasa Pelatihan	-
Pendapatan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Ekuitas Akhir  
Rp.20.967.192.971*

**E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.967.192.971,- dan Rp. 21.654.347.099,-

**F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

**F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Nihil

**F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Nihil